



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perikanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-18 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan. Kinerja Dinas Perikanan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas,



dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sangatta, Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T., M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690704 200003 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	41
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	71
MATRIKS RENSTRA	72
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	79

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perikanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas: membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

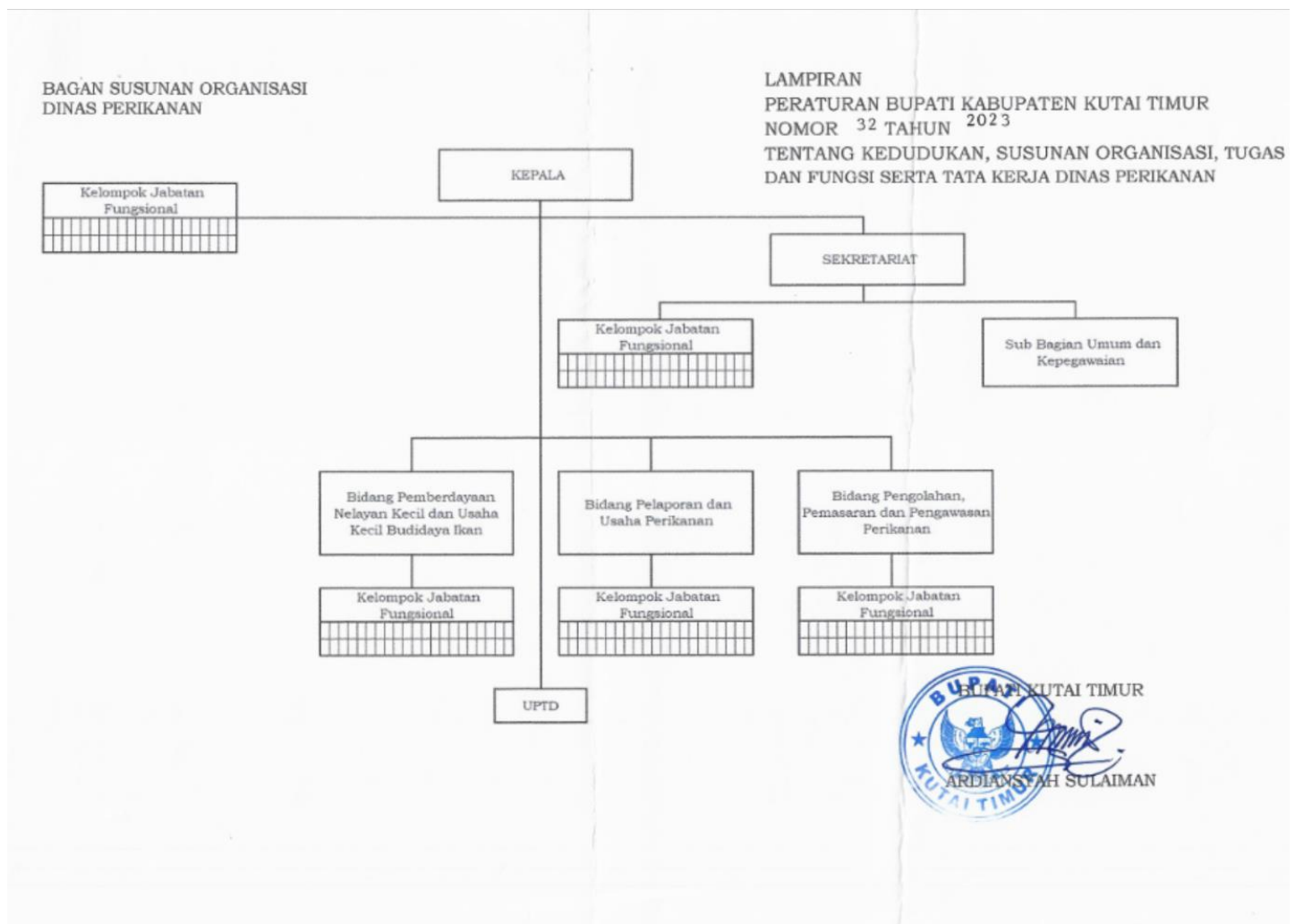
- Perumusan kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- Pembinaan dan pelaksanaan kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kemandirian pangan yang berkelanjutan;
2. Kinerja aparatur penyelenggara SKPD;
3. Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan strategis;
4. Pemasaran dan perdagangan produk perikanan;
5. Nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
6. Teknologi budidaya dan tangkap;
7. Pasar internasional produk kelautan dan perikanan, mutu, keamanan pangan dan aspek lingkungan;
8. Skala dan pengelolaan Usaha budidaya perikanan dan tangkap;
9. Status ekonomi dan sosial masyarakat nelayan dan pesisir;
10. Kelembagaan perikanan dan kelautan pendukung (sarana produksi, permodalan, teknologi, pasar KUB dan Koperasi Perikanan;
11. Sistem MSC (Monitoring, Control dan Surveillance);
12. Peraturan perundangan perikanan kelautan;
13. Pengelolaan sumber daya ikan yang lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab;



Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Kemandirian pangan yang berkelanjutan;
2. Kinerja aparatur penyelenggara SKPD;
3. Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan strategis;
4. Pemasaran dan perdagangan produk perikanan;
5. Nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
6. Teknologi budidaya dan tangkap;
7. Skala dan pengelolaan Usaha budidaya perikanan dan tangkap;
8. Sistem MSC (Monitoring, Control dan Surveillance);
9. Peraturan perundangan perikanan kelautan;
10. Pengelolaan sumber daya ikan yang lestari, berkesinambungan dan bertanggung jawab;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perikanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Perbup Kutai Timur No. 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur



4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2022 dan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu

Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian”



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

No	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3		4	5	6	7	8
1	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan	Produksi Perikanan	Ton	8.085,61	8.085,86	8.086,11	8.086,36	8.086,61
			Konsumsi Ikan	Kg/Thn	41,86	40,1	40,1	40,25	40,25
			Jumlah Jenis Bibit/benih unggul	Jenis	5	5	5	5	5
		2 Pembinaan kelompok masyarakat masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	5	3	4	4	5



		pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok Penangkapan Ikan	Kelompok		50	50	50	50
			Jumlah Kelompok pembudidaya ikan	Kelompok		13	13	13	13

Sumber : Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	Peningkatan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan rumah tangga perikanan.	$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$	Dinas Perikanan
			Konsumsi Ikan	Kg/thn	Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun	Tahun 2025 Angka Konsumsi Ikan (AKI) menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM), Perhitungan KIM yaitu konsumsi ikan didalam rumah tangga (KIDRT)	Perpres No 12 Tahun 2025, Lampiran III
			Jumlah Jenis Bibit/benih unggul	Jenis	Bibit yang memiliki sifat tahan terhadap serangan penyakit cepat berkembang biak, banyak hasilnya, dan dapat digunakan secara meluas diambil dari benih diambil yang baik	Jenis bibit/benih yang beredar dimasyarakat	Dinas Perikanan
			Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	Pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarakat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ada di Kabupaten Kutai Timur	Dinas Perikanan
			Jumlah kelompok penangkap ikan	Kelompok	Pelaku utama dibidang Perikanan yang mata pencahariannya bergerak dibidang Penangkapan Ikan		Dinas Perikanan



			Jumlah kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	Pelaku utama dibidang Perikanan budidaya yang mata pencahariannya bergerak dibidang budidaya perikanan		Dinas Perikanan
--	--	--	----------------------------------	----------	--	--	-----------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2025

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

No	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan konsumsi ikan	Produksi Perikanan	Ton	8.086,36
			Konsumsi Ikan	Kg/thn	40,25
			Jumlah Jenis Bibit/benih unggul	Jenis	5
		2 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	4
			Jumlah kelompok penangkap ikan	Kelompok	0
			Jumlah kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	13

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 6 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2		3	4	5
1	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan konsumsi ikan	Produksi Perikanan	Ton	8.086,36
			Konsumsi Ikan	Kg/thn	40,25
			Jumlah Jenis bibit/benih unggul	Jenis	5
		Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	4
			Jumlah kelompok penangkap ikan	Kelompok	0
			Jumlah kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	13

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perikanan :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.051.648.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	665.689.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	180.805.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	205.154.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	6 Dokumen	19.737.536.378
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	19.423.035.378
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	314.501.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	122 Orang	2.238.527.920
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	550.878.920
7	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	33.660.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	108 Orang	1.653.989.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	100%	1.963.909.399
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.150.954.527



10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	182.723.672
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.631.200
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	573.600.000
V	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	42.075.000
13	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.075.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	3 Unit	3.055.350.198
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	294.000.000,00
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	510.000.000
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.251.350.198
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang yang Terpelihara	23 Unit	3.985.785.030
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.989.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	313.207.140
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.648.588.890
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	784.778.658
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	784.778.658
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	6.985,40 Ton	
		Jumlah Kelompok Penangkap Ikan	50 Kelompok	
IX	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat	100%	8.096.805.015



21	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	1.121.745.240
22	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	267 Unit	6.975.059.775
X	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan yang Diberdayakan	100%	6.075.612.480
23	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	4.977.077.480
24	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	65 Kelompok	1.098.535.000
XI	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal	100%	1.177.582.350
25	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 G	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	100 Rekomendasi	1.177.582.350
	UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang			
XII	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	349.999.700
26	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	349.999.700
	UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan			
XIII	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	300.000.000
27	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	300.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5 Jenis Bibit/Benih	
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok	
		Produksi Perikanan Budidaya	1.100,81 Ton	
XIV	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin Usaha	8 Rekomendasi	481.837.930



28	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 /(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	8 Rekomendasi	481.837.930
XV	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani	14 Kelompok	1.340.573.300
29	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	849.772.540
30	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	170.658.160
31	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	320.142.600
XVI	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	11 Kelompok	11.681.969.748
32	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	332.828.000
33	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	13 Unit	10.027.329.008
34	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	17 Dokumen	1.158.800.740
35	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	10 Unit	163.012.000
	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
XVII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	100%	65.298.000
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.298.000
XVIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	25.500.000



37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5 Jenis Bibit/Benih	
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok	
		Produksi Perikanan Budidaya	1.100,71 Ton	
XIX	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah BBI yang Terlayani	1 Unit	269.202.000
38	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	269.202.000
	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
XX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	136 Orang	64.999.900
39	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	64.999.900
	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
XXI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	136 Orang	105.873.000
40	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	105.873.000
XXII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	100%	127.168.000
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.168.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul		
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan		
		Produksi Perikanan Budidaya		
XXIII	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah BBI yang terlayani	1 Unit	141.959.000
42	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	141.959.000



XXIV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Pengawas	4 Kelompok 4 Kelompok	 699.950.640
43	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	299.951.000
44	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	399.999.640
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Perikanan	40,25 Kg/Tahun	
XXV	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani	18 Unit Usaha	299.999.714
45	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	299.999.714
XXVI	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang Terbit	10 Kelompok	600.000.000
46	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	600.000.000
XXVII	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia	40 Unit	1.399.999.675
47	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	1.399.999.675
	TOTAL			66.163.941.035

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 27 Oktober 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya penambahan anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2		3	4	5
1	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan konsumsi ikan	Produksi Perikanan	Ton	8.086,36
			Konsumsi Ikan	Kg/thn	40,25
			Jumlah Jenis bibit/benih unggul	Jenis	5
		Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	4
			Jumlah kelompok penangkap ikan	Kelompok	0
			Jumlah kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	13

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	424.829.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	266.130.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	74.704.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	83.995.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	6 Dokumen	19.037.841.469
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	18.662.677.469
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	375.164.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	42.075.000
6	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42.075.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	122 Orang	324.561.100
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	262.901.100
8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	33.660.000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	108 Orang	28.000.000



V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	100%	2.789.092.351
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.041.122.479
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	313.134.672
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.631.200
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	378.204.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	5 Unit	2.048.801.599
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.147.200.000
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	901.601.599
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.110.860.598
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.110.860.598
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang yang Terpelihara	23 Unit	972.080.007
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.989.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	446.865.328
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	501.225.679
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	6.985,40 Ton	
		Jumlah Kelompok Penangkap Ikan	0 Kelompok	
IX	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat	100%	474.689.400



21	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	363.347.000
22	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	111.342.400
X	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan yang Diberdayakan	100%	2.319.466.480
23	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	135 Orang	2.319.466.480
24	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok	0
XI	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal	0	0
25	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 G	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0 Rekomendasi	0
	UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang			
XII	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Terlayani	1 Unit	151.425.700
26	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	151.425.700
	UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan			
XIII	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Terlayani	1 Unit	203.261.000
27	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	203.261.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5 Jenis Bibit/Benih	
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok	
		Produksi Perikanan Budidaya	1.100,81 Ton	
XIV	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin Usaha	0 Rekomendasi	0



28	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 /(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0
XV	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani	14 Kelompok	966.478.260
29	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	768.037.000
30	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	4 Kelompok	84.764.160
31	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	113.677.100
XVI	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	31.107.913.973
32	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	131.501.000
33	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota	13 Unit	30.460.394.297
34	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	17 Dokumen	516.018.676
35	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0 Unit	0
	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
XVII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	100%	52.206.000



36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.206.000
XVIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	17.000.000
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5 Jenis Bibit/Benih	
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok	
		Produksi Perikanan Budidaya	1.100,81 Ton	
XIX	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah BBI yang Terlayani	1 Unit	128.117.000
38	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	128.117.000
	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
XX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	136 Orang	45.353.900
39	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	45.353.900
	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	
XXI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	136 Orang	44.582.000
40	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	44.582.000
XXII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	100%	95.526.000
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.526.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul		
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan		
		Produksi Perikanan Budidaya		
XXIII	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah BBI yang terlayani	1 Unit	65.503.000



42	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	65.503.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	4 Kelompok	
XXIV	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pengawas	4 Kelompok	335.619.140
43	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	161.989.000
44	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	173.630.140
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Perikanan	40,25 Kg/Tahun	
XXV	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani	18 Unit Usaha	133.603.714
45	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	133.603.714
XXVI	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang Terbit	10 Kelompok	381.455.000
46	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	381.455.000
XXVII	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia	40 Unit	755.446.390
47	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	755.446.390
TOTAL				64.027.788.081

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara



penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	1 Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan	Produksi Perikanan	Ton	8.086,11	9.982,10	123,45 %	8.086,36	9.976,19	123,37 %
			Konsumsi Ikan	Kg/thn	40,1	41,29	102,97 %	40,25	39,16	97,29 %
			Jumlah Jenis Bibit/benih unggul	Jenis	5	5	100 %	5	4	80 %



2	Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan	Jumlah kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	3	3	100%	4	4	100%
		Jumlah kelompok penangkap ikan	Kelompok	50	81	162%	0	0	0%
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan	Kelompok	13	15	115%	13	44	338,46%

Uraian penjelasan tabel :

Capaian kinerja pada sasaran PD 1. Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan konsumsi ikan meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100,22 (dengan kategori sangat tinggi). Berikut analisis capaian kinerja sasaran 1 :

1. Produksi Perikanan

a. Analisis keberhasilan/kegagalan (hambatan/Solusi)

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator produksi perikanan merupakan hasil dari capaian kinerja yang diperoleh dari program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya dengan adanya penambahan Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada perikanan laut maupun perikanan perairan umum, pendampingan teknis kepada nelayan dan pembudidaya, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha perikanan dengan realisasi 9.976,19 ton. Sedangkan untuk kegiatan budidaya ikan jika dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun 2025 capaian realisasinya menurun sebesar 81,38 ton. Hal ini dikarenakan kenaikan harga pakan dan pupuk serta cuaca dan musim yang mengakibatkan banjir di beberapa daerah berdampak pada meningkatnya risiko kegagalan budidaya karena penurunan kualitas air media budidaya.



Adapun upaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Dinas Perikanan terus melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan pendampingan teknis dan optimalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan. Baik berupa pelatihan budidaya ikan maupun cara mengolah kualitas air media budidaya perikanan. Penerapan terpadu subsidi, diversifikasi, efisiensi, dan inovasi menjadi strategi efektif dalam mengendalikan kenaikan harga pakan dan pupuk, sehingga stabilitas produksi dapat terjamin dan keberlanjutan usaha tetap terjaga. Sehingga pembudidaya ikan bisa mengatasi dampak dari perubahan cuaca dan musim.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

Pencapaian target kinerja melibatkan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan (PNUK) dan Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan (PUP) dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya produksi perikanan secara optimal. Peningkatan efisiensi masih dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung pencapaian kinerja perikanan secara berkelanjutan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja sebesar 8.086,36 Ton realisasi sebesar 9.976,19 Ton atau capaian kinerja sebesar 123,37 %. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai. kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha perikanan dan menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.

2. Konsumsi Ikan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (hambatan/Solusi)

Hambatan atau kendala dalam pencapaian indikator ini dikarenakan keterbatasan daya beli masyarakat karena faktor ekonomi, distribusi dan rantai pasok yang belum optimal, khususnya di daerah terpencil atau non-



pesisir, sehingga harga ikan menjadi relatif lebih mahal. Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi program Gemar Makan Ikan, mendukung UMKM olahan ikan untuk memperpanjang masa simpan sekaligus meningkatkan nilai tambah, memberdayakan masyarakat dan UMKM agar berinovasi dalam pengolahan berbahan dasar ikan, serta memperkuat pengawasan mutu ikan mulai dari penangkapan hingga distribusi. Selain itu adanya perubahan metode perhitungan konsumsi ikan yang sebelumnya disebut angka konsumsi ikan (AKI) menjadi konsumsi ikan masyarakat (KIM) yang tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025. Bila sebelumnya menggunakan metode $AKI\ A + AKI\ B + AKI\ C = AKI\ Final$, tahun 2025 perhitungannya hanya AKI A yaitu konsumsi ikan didalam rumah tangga (KIDRT).

b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

Target indikator kinerja konsumsi ikan belum tercapai karena efisiensi penggunaan sumber daya belum optimal. Program penyuluhan dan pameran tidak mampu menjangkau seluruh sasaran, anggaran belum diarahkan secara efektif pada kegiatan yang berdampak langsung, serta kompetensi SDM pelaksana masih terbatas. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor eksternal seperti harga ikan turut menjadi penghambat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan, pengalokasian anggaran, serta penguatan kapasitas SDM agar target kinerja dapat tercapai di periode berikutnya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target indikator kinerja Konsumsi Ikan belum tercapai karena pelaksanaan program belum berjalan sesuai perencanaan, penggunaan sumber daya belum efisien dan kurangnya partisipasi masyarakat. perlunya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar tujuan dapat tercapai di periode berikutnya.



3. Jumlah Jenis Bibit/benih unggul

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (hambatan/Solusi)

Hambatan dari pencapaian indikator kinerja Jenis Bibit/benih unggul adalah pemanfaatan benih unggul dimasyarakat yang belum optimal. Hambatan utama dari indikator kinerja ini yaitu terbatasnya ketersediaan benih unggul berkualitas, terutama pada musim tertentu, sehingga masyarakat terkadang membeli benih ikan non-unggul yang lebih murah. Selain itu, kurangnya pengetahuan pembudidaya mengenai karakteristik benih ikan unggulan, ketidaksesuaian benih dengan kondisi lingkungan lokal, kualitas air yang kurang baik, serta serangan penyakit atau perubahan cuaca ekstrem yang tidak dapat diantisipasi oleh pembudidaya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian ini antara lain: meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang benih ikan unggul berkualitas, memperkuat sistem pembenihan lokal, serta memastikan distribusi benih tepat waktu dan sesuai jumlah kebutuhan. Selain itu, pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan bagi pembudidaya sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani benih unggul, pengelolaan kualitas air, pakan dan pencegahan penyakit.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

Pencapaian target kinerja melibatkan bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan (PNUK) dan UPT yang ada pada program pengelolaan perikanan budidaya di Dinas Perikanan. Efisiensi penggunaan sumberdaya menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung target kinerja dan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik untuk mendukung pencapaian target kinerja.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegagalan atau hambatan target kinerja ini dikarenakan ketidaksesuaian jenis bibit dengan kondisi air serta kurangnya Pengetahuan masyarakat



pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik dan benar. upaya penanganan dilakukan melalui peningkatan kesesuaian jenis bibit dengan kondisi kualitas air, penguatan pendampingan teknis, serta peningkatan pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan mengenai cara budidaya ikan yang baik dan benar. Melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, diharapkan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dapat diminimalisir dan efektivitas program pengelolaan perikanan budidaya dapat meningkat.

Capaian kinerja pada sasaran PD 2. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 146,15% (dengan kategori sangat tinggi). Berikut analisis capaian kinerja sasaran 2 :

1. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (hambatan/Solusi)

Keberhasilan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota, kapasitas, dukungan pemerintah, serta koordinasi antar instansi. Hambatan dalam perkembangan Pokmaswas adalah anggaran operasional yang terbatas, sarana dan prasarana yang minim, dan kendala komunikasi. Solusi utamanya meliputi anggaran yang cukup, pelatihan personil, penggunaan teknologi, dan peningkatan motivasi serta penguatan koordinasi antara instansi.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya jumlah kelompok masyarakat pengawas terletak pada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas kelompok.



c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tercapainya target kinerja ini diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumberdaya yang efisien serta sumberdaya manusia yang baik.

2. Jumlah kelompok penangkap ikan

Indikator kinerja jumlah kelompok penangkap ikan pada perubahan kegiatan tahun 2025 ditetapkan 0 (nol) kelompok karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian agar program yang lebih prioritas dapat berjalan dengan baik.

3. Jumlah kelompok pembudidaya ikan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (hambatan/Solusi)

Target kinerja kelompok pembudidaya ikan 13 kelompok dengan realisasi 44 kelompok pembudidaya ikan. Keberhasilan capaian indikator kelompok pembudidaya ikan diperoleh dari:

- Ketersediaan sumber daya alam yang mendukung, seperti kualitas air yang baik, lahan yang memadai, serta akses terhadap benih ikan dan pakan ikan yang berkualitas baik.
- Kekompakan dan solidaritas antar anggota kelompok menjadi faktor penting, karena kerja sama yang baik akan memudahkan pengelolaan usaha bersama.
- Dukungan pemerintah maupun stakeholder lain dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan bantuan permodalan turut memperkuat kapasitas kelompok.
- Serta akses pasar yang terjamin serta kemampuan kelompok dalam mengadopsi teknologi budidaya modern yang lebih efisien.

Walaupun demikian, masih ada kendala atau hambatan dalam pencapaian indikator ini, antara lain :

- Keterbatasan modal dan sulitnya akses terhadap kredit perbankan membuat kelompok kesulitan memenuhi kebutuhan produksi.



- Kurangnya pengetahuan teknis sehingga terjadi kesalahan dalam manajemen budidaya, misalnya pemberian pakan yang tidak sesuai atau lemahnya pengendalian penyakit.
- Fluktuasi harga ikan dan keterbatasan jaringan pemasaran menyebabkan pendapatan kelompok tidak stabil. Di sisi kelembagaan, konflik internal, lemahnya kepemimpinan, serta kurangnya komitmen anggota sering kali membuat kelompok tidak aktif.
- Faktor lingkungan seperti pencemaran air, perubahan iklim, dan serangan penyakit juga menjadi tantangan serius yang dapat menurunkan hasil produksi.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis akan meningkatkan keterampilan budidaya.
- Akses permodalan dapat diperluas melalui kerja sama dengan koperasi, lembaga keuangan, maupun mitra swasta. Diversifikasi produk dan pasar juga penting agar kelompok tidak bergantung pada satu jenis komoditas atau saluran distribusi.
- Penerapan sistem budidaya ramah lingkungan dan monitoring kesehatan ikan secara berkala akan membantu menjaga keberlanjutan usaha.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya

Pencapaian target kinerja merupakan pencapaian bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan (PNUK) pada program pengelolaan perikanan budidaya di Dinas Perikanan. Efisiensi penggunaan sumberdaya menggunakan anggaran untuk aktifitas dan kegiatan yang benar-benar mendukung target kinerja serta menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik untuk mendukung pencapaian target kinerja.



- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Target kinerja sebesar 13 kelompok pembudidaya ikan, realisasi mencapai 44 kelompok pembudidaya ikan dengan capaian kinerja sebesar 338,46 %.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah sesuai.



B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	26.750.141.124	21.805.327.634	81,51%
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	424.829.000	259.670.312	61,12%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	266.130.000	134.148.230	50,41%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.704.000	66.314.082	88,77%
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	83.995.000	59.208.000	70,49%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	19.037.841.469	15.606.268.535	81,97%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18.662.677.469	15.328.527.640	82,13%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	375.164.000	277.740.895	74,03%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana	42.075.000	29.620.000	70,40%
6	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.075.000	29.620.000	70,40%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	324.561.100	289.180.000	89,10%



7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	262.901.100	256.260.000	97,47%
8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33.660.000	17.920.000	53,24%
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000	15.000.000	53,57%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	2.789.092.351	2.547.287.739	91,33%
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.041.122.479	1.879.759.254	92,09%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	313.134.672	294.284.751	93,98%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56.631.200	54.358.000	95,99%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.204.000	318.885.734	84,32%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tersedia	2.048.801.599	1.521.388.432	74,26%
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.147.200.000	1.091.481.004	95,14%
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	901.601.599	429.907.428	47,68%
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.110.860.598	959.414.848	86,37%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.110.860.598	959.414.848	86,37%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang yang Terpelihara	972.080.007	592.497.768	60,95%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23.989.000	17.275.550	72,01%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	446.865.328	94.441.800	21,13%



		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	501.225.679	480.780.418	95,92%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	3.148.842.580	2.817.884.845	89,49%
		Jumlah Kelompok Penangkap Ikan			
IX	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat	474.689.400	275.651.300	58,07%
21	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	363.347.000	185.306.900	51,00%
22	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	111.342.400	90.344.400	81,14%
X	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan yang Diberdayakan	2.319.466.480	2.255.287.538	97,23%
23	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.319.466.480	2.255.287.538	97,23%
24	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0	0	0
XI	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal	0	0	0
25	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 G	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	0	0	0
	UPT Tempat Pendaratan Ikan Sangkulirang				
XII	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	151.425.700	120.877.740	79,83%
26	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	151.425.700	120.877.740	79,83%
	UPT Tempat Pendaratan Ikan Kenyamukan				
XIII	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	203.261.000	166.068.267	81,70%



27	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	203.261.000	166.068.267	81,70%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	32.074.392.233	25.986.980.677	81,02%
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan			
		Produksi Perikanan Budidaya			
XIV	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin Usaha	0	0	0
28	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 /(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	0	0	0
XV	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani	966.478.260	670.107.422	69,33%
29	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	768.037.000	586.379.272	76,35%
30	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	84.764.160	30.108.000	35,52%
31	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	113.677.100	53.620.150	47,17%
XVI	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	31.107.913.973	25.316.873.255	81,38%
32	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	131.501.000	69.472.400	52,83%
33	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/ kota	30.460.394.297	25.089.437.707	82,37%



34	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	516.018.676	157.963.148	30,61%
35	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0	0	0
	UPT Balai Benih Ikan Kaliurang				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	69.206.000	61.014.500	88,16%
XVII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	52.206.000	46.246.000	88,58%
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52.206.000	46.246.000	88,58%
XVIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	14.768.500	86,87%
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17.000.000	14.768.500	86,87%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	128.117.000	123.559.400	96,44%
		Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan			
		Produksi Perikanan Budidaya			
XIX	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah BBI yang Terlayani	128.117.000	123.559.400	96,44%
38	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	128.117.000	123.559.400	96,44%
	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	45.353.900	35.948.500	79,26%
XX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	45.353.900	35.948.500	79,26%
39	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45.353.900	35.948.500	79,26%
	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	140.108.000	114.038.800	81,39%



XXI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	44.582.000	18.554.800	41,62%
40	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44.582.000	18.554.800	41,62%
XXII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayannya Administrasi Umum	95.526.000	95.484.000	99,96%
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95.526.000	95.484.000	99,96%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	65.503.000	64.569.820	98,58%
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan			
		Produksi Perikanan Budidaya			
XXIII	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah BBI yang terlayani	65.503.000	64.569.820	98,58%
42	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	65.503.000	64.569.820	98,58%
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	335.619.140	327.946.900	97,71%
XXIV	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pengawas	335.619.140	327.946.900	97,71%
43	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	161.989.000	157.066.450	96,96%
44	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	173.630.140	170.880.450	98,42%
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Perikanan	1.270.505.104	1.231.821.800	96,96%
XXV	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani	133.603.714	127.057.000	95,10%
45	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	133.603.714	127.057.000	95,10%



XXVI	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang Terbit	381.455.000	375.570.700	98,46%
46	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	381.455.000	375.570.700	98,46%
XXVII	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia	755.446.390	729.194.100	96,52%
47	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	755.446.390	729.194.100	96,52%
Total			64.027.788.081	52.569.092.876	82,10%



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase Capaian Berdasarkan Sasaran	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian	
I	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perikanan yang Akuntabel	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100%	101%	27.004.809.024	22.016.329.434	81,53%	1,23
I			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	100%		424.829.000	259.670.312	61,12%	1,64
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	100%		266.130.000	134.148.230	50,41%	1,98
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100%		74.704.000	66.314.082	88,77%	1,13
3			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	1	Dokumen	1	100%		83.995.000	59.208.000	70,49%	1,42
II			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	100%		19.037.841.469	15.606.268.535	81,97%	1,22
4			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124	Orang/Bulan	121	98%		18.662.677.469	15.328.527.640	82,13%	1,19



5			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	6	100%		375.164.000	277.740.895	74,03%	1,35
III			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	100	100%		42.075.000	29.620.000	70,40%	1,42
6			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100%		42.075.000	29.620.000	70,40%	1,42
IV			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122	Orang	121	99,18%		324.561.100	289.180.000	89,10%	1,11
7			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	2	100,00%		262.901.100	256.260.000	97,47%	1,03
8			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	100,00%		33.660.000	17.920.000	53,24%	1,88
9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108	Orang	6	5,56%		28.000.000	15.000.000	53,57%	0,10
V			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%		2.789.092.351	2.547.287.739	91,33%	1,09
10			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100,00%		2.041.122.479	1.879.759.254	92,09%	1,09
11			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	1	100,00%		313.134.672	294.284.751	93,98%	1,06
12			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	100,00%		56.631.200	54.358.000	95,99%	1,04
13			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	1	100,00%		378.204.000	318.885.734	84,32%	1,19
VI			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Unit	6	120,00%		2.048.801.599	1.521.388.432	74,26%	1,62
14			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	0	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00



15		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	5	250,00%		1.147.200.000	1.091.481.004	95,14%	2,63
16		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	1	50,00%		901.601.599	429.907.428	47,68%	1,05
VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	1	100,00%		1.110.860.598	959.414.848	86,37%	1,16
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	1	100,00%		1.110.860.598	959.414.848	86,37%	1,16
VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23	Unit	20	86,96%		972.080.007	592.497.768	60,95%	1,43
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	1	100,00%		23.989.000	17.275.550	72,01%	1,39
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	22	Unit	18	81,82%		446.865.328	94.441.800	21,13%	3,87
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	100,00%		501.225.679	480.780.418	95,92%	1,04
		UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100%					
IX		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122	Orang	121	99,18%		45.353.900	35.948.500	79,26%	1,25



21			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	Orang	3	100,00%		45.353.900	35.948.500	79,26%	1,26
			UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122	Orang	121	99,18%		44.582.000	18.554.800	41,62%	2,38
22			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	5	25,00%		44.582.000	18.554.800	41,62%	0,60
XI			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%		95.526.000	95.484.000	99,96%	1,00
23			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100,00%		95.526.000	95.484.000	99,96%	1,00
			UPT Balai Benih Ikan Kaliorang									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100,00%					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100,00	100,00%			52.206.000	46.246.000	88,58%
24			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100,00%		52.206.000	46.246.000	88,58%	1,13
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	1	100,00%		17.000.000	14.768.500	86,87%	1,15
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1	100,00%		17.000.000	14.768.500	86,87%	1,15



II	Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Perikanan	1. Peningkatan jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.985,55	Ton	8.802,09	126,00%	125,89%	829.376.100	562.597.307	67,83%	1,86
XIII			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	100	100,00%		474.689.400	275.651.300	58,07%	1,72
26			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1	Dokumen	1	100,00%		363.347.000	185.306.900	51,00%	1,96
27			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0	Unit	0	0,00%		111.342.400	90.344.400	81,14%	0,00
XIV			UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN									
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Unit	1	100,00%		203.261.000	166.068.267	81,70%	1,22
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	1	100,00%		203.261.000	166.068.267	81,70%	1,22
28			UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG									
XV			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Unit	1	100,00%		151.425.700	120.877.740	79,83%	1,25
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	1	100,00%		151.425.700	120.877.740	79,83%	1,25
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5	Jenis Bibit/Benih	4	80,00%		32.268.012.233	26.175.109.897	81,12%	0,99
29				1.100,81	Ton	1.174,10	106,66%					



XVI			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1	Dokum en	1	100,00%		31.107.913.973	25.316.873.255	81,38%	1,23
30			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12	Dokume n	12	100,00%		131.501.000	69.472.400	52,83%	1,89
31			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13	Unit	44	338,46%		30.460.394.297	25.089.437.707	82,37%	4,11
32			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	17	Dokume n	17	100,00%		516.018.676	157.963.148	30,61%	3,27
33			Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0	Unit	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
XVII			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14	Kelomp ok	43	307,14%		1.160.098.260	858.236.642	73,98%	4,15
34			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	5	Kelomp ok	6	120,00%		768.037.000	586.379.272	76,35%	1,57
35			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4	Kelomp ok	15	375,00%		84.764.160	30.108.000	35,52%	10,56
36			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelomp ok	22	440,00%		113.677.100	53.620.150	47,17%	9,33
37			UPT Balai Benih Ikan Kaliorang									
			Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	2	Kelomp ok	2	100,00%		128.117.000	123.559.400	96,44%	1,04



38	XVIII	UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA										
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	2	Kelompok	0	0,00%		65.503.000	64.569.820	98,58%	0,00	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40,25	Kg/Tahun	39,16	97,29%		1.270.505.104	1.231.821.800	96,96%	1,00	
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	18	Unit Usaha	18	100,00%		133.603.714	127.057.000	95,10%	1,05	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1	Dokumen	1	100,00%		133.603.714	127.057.000	95,10%	1,05	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10	Kelompok	10	100,00%		381.455.000	375.570.700	98,46%	1,02	
		Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	10	Unit Usaha	20	200,00%		381.455.000	375.570.700	98,46%	2,03	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit	40	100,00%		755.446.390	729.194.100	96,52%	1,04	
41		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Pelaku Usaha	15	150,00%		755.446.390	729.194.100	96,52%	1,55	



XXI	42	43	XXII	44	XXIII	2. Pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0	Kelompok	0	0,00%	50,00%	2.319.466.480	2.255.287.538	97,23%	0,00%
							Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	135	Orang	135	100,00%		2.319.466.480	2.255.287.538	97,23%	1,03
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	135	Orang	135	100,00%	2.319.466.480		2.255.287.538	97,23%	1,03							
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0	Kelompok	0	0,00%	0		0	0,00%	0,00							
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	0,00%	0		0	0,00%	0,00							
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0	Rekomendasi	0	0,00%	0		0	0,00%	0,00							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13	Kelompok	44	338,46%	0		0	0,00%	0,00							
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rekomendasi	0	0,00%	0		0	0,00%	0,00							



45			Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 / (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0	Rekomendasi	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
XXIV			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	Kelompok	4	100,00%		335.619.140	327.946.900	97,71%	1,02
			Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%		335.619.140	327.946.900	97,71%	1,02
46			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5	Pelaku Usaha	11	220,00%		161.989.000	157.066.450	96,96%	2,27
47			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5	Pelaku Usaha	31	620,00%		173.630.140	170.880.450	98,42%	6,30
			Total					92,22%	64.027.788.081	52.569.092.876	82,10%	1,12



Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai standard efektif dan efisien. Pencapaian Kinerja dan Anggaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran dari Perangkat Daerah, yaitu Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan, meningkatnya jumlah produksi, jenis bibit unggul dan angka konsumsi ikan, terbinanya kelompok masyarakat pengawas perikanan, penangkap ikan dan pembudidaya ikan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Persentase Capaian 5 Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100,00%	100%	27.004.809.024	22.016.329.434	81,53%	1,23
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	100,00%		424.829.000	259.670.312	61,12%	1,64
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	100,00%		266.130.000	134.148.230	50,41%	1,98
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100,00%		74.704.000	66.314.082	88,77%	1,13
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	1	Dokumen	1	100,00%		83.995.000	59.208.000	70,49%	1,42
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	100,00%		19.037.841.469	15.606.268.535	81,97%	1,22
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124	Orang/Bulan	121	97,58%		18.662.677.469	15.328.527.640	82,13%	1,19
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	6	100,00%		375.164.000	277.740.895	74,03%	1,35



III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%		42.075.000	29.620.000	70,40%	1,42
6	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100,00%		42.075.000	29.620.000	70,40%	1,42
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122	Orang	121	99,18%		324.561.100	289.180.000	89,10%	1,11
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	2	100,00%		262.901.100	256.260.000	97,47%	1,03
8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	100,00%		33.660.000	17.920.000	53,24%	1,88
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108	Orang	6	5,56%		28.000.000	15.000.000	53,57%	0,10
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%		2.789.092.351	2.547.287.739	91,33%	1,09
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100,00%		2.041.122.479	1.879.759.254	92,09%	1,09
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	1	100,00%		313.134.672	294.284.751	93,98%	1,06
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	1	100,00%		56.631.200	54.358.000	95,99%	1,04
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	1	100,00%		378.204.000	318.885.734	84,32%	1,19
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Unit	6	120,00%		2.048.801.599	1.521.388.432	74,26%	1,62
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	0	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	5	250,00%		1.147.200.000	1.091.481.004	95,14%	2,63



16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	1	50,00%		901.601.599	429.907.428	47,68%	1,05
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	1	100,00%		1.110.860.598	959.414.848	86,37%	1,16
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	1	100,00%		1.110.860.598	959.414.848	86,37%	1,16
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23	Unit	20	86,96%		972.080.007	592.497.768	60,95%	1,43
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	1	100,00%		23.989.000	17.275.550	72,01%	1,39
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	22	Unit	18	81,82%		446.865.328	94.441.800	21,13%	3,87
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	100,00%		501.225.679	480.780.418	95,92%	1,04
	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100%					
IX	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122	Orang	121	99,18%		45.353.900	35.948.500	79,26%	1,25
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	Orang	3	100,00%		45.353.900	35.948.500	79,26%	1,26



	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100,00%					
X	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122	Orang	121	99,18%	44.582.000	18.554.800	41,62%	2,38	
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	5	25,00%	44.582.000	18.554.800	41,62%	0,60	
XI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%	95.526.000	95.484.000	99,96%	1,00	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100,00%	95.526.000	95.484.000	99,96%	1,00	
	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	100	100,00%					
XII	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%	52.206.000	46.246.000	88,58%	1,13	
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	1	100,00%	52.206.000	46.246.000	88,58%	1,13	
XIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	1	100,00%	17.000.000	14.768.500	86,87%	1,15	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1	100,00%	17.000.000	14.768.500	86,87%	1,15	



	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.985,55	Ton	8802,09	126,00%		3.148.842.580	2.817.884.845	89,49%	1,41
		0	Kelompok	0	0,00%					
XIV	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	100	100,00%		474.689.400	275.651.300	58,07%	1,72
26	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1	Dokumen	1	100,00%		363.347.000	185.306.900	51,00%	1,96
27	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0	Unit	0	0,00%		111.342.400	90.344.400	81,14%	0
	UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN									
XV	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Unit	1	100,00%	63,00%	203.261.000	166.068.267	81,70%	1,22
28	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	1	100,00%		203.261.000	166.068.267	81,70%	1,22
	UPT. TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG									
XVI	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Unit	1	100,00%		151.425.700	120.877.740	79,83%	1,25
29	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	1	100,00%		151.425.700	120.877.740	79,83%	1,25
XVII	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	135	Orang	135	100,00%		2.319.466.480	2.255.287.538	97,23%	1,03
30	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	135	Orang	135	100,00%		2.319.466.480	2.255.287.538	97,23%	1,03



31	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0	Kelompok	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
XVII I	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
32	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0	Rekomendasi	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	13	Kelompok	44	338,46%	175,04%	0	0	0,00%	0,00
XIX	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rekomendasi	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
33	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 /(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0	Rekomendasi	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5	Jenis Bibit/Benih	4	80,00%		32.268.012.233	26.175.109.897	81,12%	0,99



		1.100,8 1	Ton	1.174,10	106,66%					
XX	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1	Dokumen	1	100,00%		31.107.913.973	25.316.873.255	81,38%	1,23
34	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	12	100,00%		131.501.000	69.472.400	52,83%	1,89
35	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13	Unit	44	338,46%		30.460.394.297	25.089.437.707	82,37%	4,11
36	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17	Dokumen	17	100,00%		516.018.676	157.963.148	30,61%	3,27
37	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0	Unit	0	0,00%		0	0	0,00%	0,00
XXI	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14	Kelompok	43	307,14%		1.160.098.260	858.236.642	73,98%	4,15
38	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	5	Kelompok	6	120,00%		768.037.000	586.379.272	76,35%	1,57
39	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4	Kelompok	15	375,00%		84.764.160	30.108.000	35,52%	10,56
40	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelompok	22	440,00%		113.677.100	53.620.150	47,17%	9,33
	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang									



41	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	2	Kelompok	2	100,00%		128.117.000	123.559.400	96,44%	1,04
	UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA									
42	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	2	Kelompok	0	0,00%		65.503.000	64.569.820	98,58%	0,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40,25	Kg/Tahun	39,16	97,29%		1.270.505.104	1.231.821.800	96,96%	1,00
XXII	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	18	Unit Usaha	18	100,00%	97,29%	133.603.714	127.057.000	95,10%	1,05
43	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1	Dokumen	1	100,00%		133.603.714	127.057.000	95,10%	1,05
XXII I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10	Kelompok	10	100,00%		381.455.000	375.570.700	98,46%	1,02
44	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	10	Unit Usaha	20	200,00%		381.455.000	375.570.700	98,46%	2,03
XXI V	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit	40	100,00%		755.446.390	729.194.100	96,52%	1,04
45	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10	Pelaku Usaha	15	150,00%		755.446.390	729.194.100	96,52%	1,55



	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	Kelompok	4	100,00%		335.619.140	327.946.900	97,71%	1,02
XXV	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00%		335.619.140	327.946.900	97,71%	1,02
46	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5	Pelaku Usaha	11	220,00%	100,00%	161.989.000	157.066.450	96,96%	2,27
47	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5	Pelaku Usaha	31	620,00%		173.630.140	170.880.450	98,42%	6,30
	TOTAL					107,07%	64.027.788.081	52.569.092.876	82,10%	1,30



Uraian penjelasan tabel :

Pada 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai standard efektif dan efisien. Namun, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran, ada beberapa sub kegiatan terdampak yaitu:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
- Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 / (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
- Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

Sedangkan untuk sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas dan UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba) dan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil (UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba) ada ketidaksesuaian dalam menentukan target indikator dengan jumlah anggaran yang tersedia dan efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 123,19% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,22% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 146,15% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 64.027.788.081 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 52.569.092.876 dengan demikian serapan anggaran tahun 2025 sebesar 82,10% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,30.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, Januari 2026
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T., M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690704 200003 1 007

LAMPIRAN





Tabel 6.1

MATRIX RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN
TAHUN 2021 - 2026 KABUPATEN KUTAI TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penguji	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perikanan yang Akuntabel	Terpenuluhnya Tata Kelola Administrasi Perikanan dan Laporan Keuangan	3.2 5.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	10.682.871.606	100%	11.543.658.802	100%	10.835.636.670	100%	11.377.418.503	100%	11.491.192.688	100%	11.606.104.615	100%	11.606.104.615		
		3.2 5.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	117.382.200	3 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	240.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000		
		3.2 5.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	4 Dokumen	9.985.189.626	4 Dokumen	10.290.658.802	4 Dokumen	10.190.658.802	4 Dokumen	10.220.658.802	4 Dokumen	10.240.658.802	4 Dokumen	10.260.658.802	4 Dokumen	10.260.658.802		
		3.2 5.0 1.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana	0%	-	0%	-	0%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		



		3.2 5.0 1.2. 05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terlayani	136 Oran g	60.691.5 00	136 Orang	450.000. 000	136 Orang	234.977. 868	136 Orang	376.759. 701	136 Orang	430.533. 886	136 Orang	440.445.81 3	136 Oran g	440.445.81 3		
		3.2 5.0 1.2. 06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase terlayaniny a Administra si Umum	100%	329.968. 780	100%	268.000. 000	100%	190.000. 000	100%	280.000. 000	100%	320.000. 000	100%	355.000.00 0	100%	355.000.00 0		
		3.2 5.0 1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya jasa Urusan Pemerintah an Daerah	0%	-	0%	-	0%	-	100%	30.000.0 00	100%	30.000.0 00	100%	30.000.000	100%	30.000.000		
		3.2 5.0 1.2. 09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang yang terpelihara	26 unit	189.639. 500	26 unit	210.000. 000	26 unit	70.000.0 00	26 unit	170.000. 000	26 unit	180.000. 000	26 unit	220.000.00 0	26 unit	220.000.00 0		
Menata Daya Saing Ekono mi Masyar akat berbasi s Perikan an	1. Pening katan Jumlah Produk si, Jenis Bibit Unggul dan Angka Konsu msi Ikan		PROGRAM PENGELO LAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8,085, 61	5,652.92 9.394	8,085,61	3,225.00 0.000	6,985,25	2,822.85 8.802	6,985,40	2,840.00 0.000	6,985,55	2,900.00 0.000	6,985,70	3,000.000. 000	6,985, 70	3,000.000. 000		
				Jumlah Kelompok Penangkap Ikan					50		50		50		50		50			
		3.2 5.0 3.2. 01	Pengelolaan Penangkap an Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahaka n dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Ikan di wilayah Perairan Umum dan darat	100%	5,562.92 9.394	100%	3,050.00 0.000	100%	2,547.85 8.802	100%	2,565.00 0.000	100%	2,625.00 0.000	100%	2,725.000. 000	100%	2,725.000. 000		



3.2 5.0 3.2. 03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Terlayani	2 unit	90.000.000	2 unit	175.000.000	2 unit	275.000.000	2 unit	275.000.000	2 unit	275.000.000	2 unit	275.000.000	2 unit	275.000.000		
3.2 5.0 4	PROGRAM PENGELAAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5	240.000.000	5	1.625.000.000	5	950.000.000	5	975.000.000	5	1.025.000.000	5	1.075.000.000	5	1.075.000.000		
		Jumlah Kelompok Pembudidaya					13		13		13		13		13			
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)					1.100,61		1.100,71		1.100,81		1.100,91		1.100,91			
3.2 5.0 4.2. 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Terkelolaan Pembudidayaan Ikan	2 Kelompok	150.000.000	5 Kelompok	1.150.000.000	10 Kelompok	695.000.000	11 Kelompok	660.000.000	12 Kelompok	740.000.000	13 Kelompok	770.000.000	13 Kelompok	770.000.000		
3.2 5.0 4.2. 02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan yang Terlayani	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani	2 Kelompok	90.000.000	3 Kelompok	475.000.000	5 Kelompok	255.000.000	6 Kelompok	315.000.000	7 Kelompok	285.000.000	8 Kelompok	305.000.000	8 Kelompok	305.000.000		
3.2 5.0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Perikanan (Kg/tahun)	41,00	100.001.000	41.86	600.000.000	40.1	1.600.000.000	40.1	1.700.000.000	40.25	1.800.000.000	40.25	1.900.000.000	40.25	1.900.000.000		
3.2 5.0 6.2. 01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani	5 Unit Usaha	50.000.000	10 Unit Usaha	100.000.000	18 Unit Usaha	300.000.000	18 Unit Usaha	300.000.000	18 Unit Usaha	300.000.000	18 Unit Usaha	300.000.000	18 Unit Usaha	300.000.000		



		3.2 5.0 6.2. 02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang terbit	0 Kelompok	-	2 Kelompok	150.000.000	5 Kelompok	400.000.000	6 Kelompok	400.000.000	7 Kelompok	450.000.000	8 Kelompok	450.000.000	9 Kelompok	450.000.000		
		3.2 5.0 6.2. 03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia	5 Unit	50.001.000	30 Unit	350.000.000	102 Unit	900.000.000	102 Unit	1.000.000.000	102 Unit	1.050.000.000	102 Unit	1.150.000.000	102 Unit	1.150.000.000		
2. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8,085,61	149.998.000	8,085,61	257.141.198	6.985,25	277.141.198	6.985,40	360.000.000	6.985,55	400.000.000	6.985,70	400.000.000	6.985,70	400.000.000		
			Jumlah Kelompok Penangkap Ikan				50				50				50				50	
		3.2 5.0 3.2. 02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Nelayan yang diberdayakan	100%	149.998.000	100%	157.141.198	100%	157.141.198	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000		
		3.2 5.0 3.2. 04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa dan	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal	0%	-	0%	-	0%	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		



			Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		3.2 5.0 3.2. 05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan dan Kapal Pengangkutan ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Pengadaan Kapal	0%	-	0%	-	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
		3.2 5.0 3.2. 06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Pendaftaran Kapal	0%	-	100%	100.000.000	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	



		Kabupaten/ Kota																
3.2 5.0 4	PROGRAM PENGELO LAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5		5		5		5		5		5		5		5	
		Jumlah Kelompok Pembudida ya		-		100.000. 000	13	100.000. 000	13	125.000. 000	13	125.000. 000	13	125.000.00 0	13	125.000.00 0		
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)					1.100,61		1.100,71		1.100,81		1.100,91		1.100, 91			
3.2 5.0 4.2. 01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudida yaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomenda si Izin Usaha	0 Reko men dasi	-	2 Rekom endasi	50.000.0 00	3 Rekom endasi	50.000.0 00	4 Rekom endasi	50.000.0 00	5 Rekom endasi	50.000.0 00	6 Rekom endasi	50.000.000	6 Reko men dasi	50.000.000		
3.2 5.0 4.2. 03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudida ya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan Daftar Pembudida ya	0%	-	100%	50.000.0 00	100%	50.000.0 00	100%	75.000.0 00	100%	75.000.0 00	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
3.2 5.0 5	PROGRAM PENGAWA SAN SUMBERD AYA KELAUTA N DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswa s)	4	50.000.0 00	5	125.000. 000	3	1.000.00 0.000	4	1.100.00 0.000	4	1.300.00 0.000	5	1.300.000. 000	5	1.300.000. 000		



		3.2 5.0 5.2. 01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pengawas	2 Kelompok	50.000.000	2 Kelompok	125.000.000	3 Kelompok	1.000.000.000	4 Kelompok	1.100.000.000	4 Kelompok	1.300.000.000	5 Kelompok	1.300.000.000	5 Kelompok	1.300.000.000		
				TOTAL		16.875.800.000		17.475.800.000		17.585.636.670		18.477.418.503		19.041.192.688		19.406.104.615		19.406.104.615		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Yuliansyah, S.T., M.T**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690704 200003 1 007
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Ardiansyah Sulaiman**
Jabatan : Bupati Kutai Timur
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur,



Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perikanan,



H. Yuliansyah, S.T., M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690704 200003 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan	8.086,36 ton
		2. Jumlah Angka Konsumsi Ikan	40,25 kg/thn
		3. Jumlah Jenis bibit/benih unggul	5 Jenis bibit/benih
		4. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	4 POKMASWAS
		5. Jumlah Kelompok Penangkap Ikan	10 Kelompok
		6. Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.004.809.024,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 3.148.842.580,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 32.268.012.233,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 335.619.140,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
5.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.270.505.104,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur


Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perikanan


H. Yuliansyah, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19690704 200003 1 007

